

Praktik *Governmentality* dan Nativisme dalam Kebijakan Keluarga Berencana Krama Bali

I Putu Rai Sukmaning Wahyu¹), I Ketut Putra Erawan²), Anak Agung Sagung Mirah Mahaswari Jayanthi Mertha³)

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: iputurai@gmail.com¹, ketut.erawan@ipd.or.id², mahaswari@unud.ac.id³

ABSTRACT

There is an odd relation between othering practices, efforts to secure native interests, birth control mechanism by introducing 'four-child norm,' and claim to preserve traditional Balinese naming system around the issuance of Krama Bali Family Planning policy. This article aims to explain the relation and historicity of these problems. To achieve these objectives, this study uses two theoretical perspectives: governmentality and nativism. The first perspective serves to investigate specific rationality behind the issuance of Krama Bali Family Planning policy and understand it as a way for the government to manufacture the governable subject; while the second perspective is used to analyze how the governable subjects are formed through the categorization of natives (orang 'asli' Bali) and non-natives (pendatang) groups.

Keywords: *governmentality, nativism, family planning, krama Bali*

1. PENDAHULUAN

Pada bulan Juni 2019, melalui Ingub Bali No. 1545, Gubernur Bali I Wayan Koster memerintahkan bupati dan walikota se-Bali untuk mengkampanyekan Keluarga Berencana (KB) Krama Bali; sebuah kebijakan kontrol kelahiran 'empat anak' menggantikan KB nasional 'dua anak.' Ada dua pertimbangan yang mendasari kebijakan ini. Pertama, KB 'dua anak' dinilai mengabaikan hak reproduksi orang Bali. Hak itu menyangkut tradisi penamaan orang Bali berdasarkan urutan kelahiran hingga 'empat anak,' yakni *Wayan* (anak pertama), *Made* (anak kedua), *Nyoman* (anak ketiga), dan *Ketut* (anak keempat). Kedua, anjuran 'dua anak' dianggap mengancam eksistensi orang dan budaya Bali. Menurut laporan SDKI (2018), *total fertility rate* (TFR) di Bali tahun 2017 hanya 2,1—artinya, rata-rata perempuan Bali memiliki dua hingga tiga anak sepanjang usia suburnya. Koster khawatir bila kecenderungan ini berlanjut,

maka nama *Nyoman* dan *Ketut* akan "punah" dan "populasi orang Bali akan cepat habis" (*Media Indonesia*, 28 Juni 2019).

Meski mulanya terbit merespons persoalan demografi, KB Krama Bali dengan segera dikerangkakan serupa kebijakan preservasi budaya. Kabiro Humas Pemprov Bali mengatakan bahwa sejak awal KB Krama Bali didasari semangat melestarikan budaya Bali (*Kompas*, 5 Juli 2019). Sebelumnya, Koster bahkan mengklaim tujuan utama KB Krama Bali adalah melindungi *Nyoman* dan *Ketut* yang ia glorifikasi sebagai "warisan leluhur yang begitu arif" (*Bali Express*, 27 November 2019). Dalam hal ini, Koster memang dikenal punya agenda politik kuat. Selain program kontrol kelahiran *à la* Bali, ia turut mendorong keluarnya serangkaian kebijakan konservatif; seperti penggunaan pakaian adat Bali di hari Kamis bagi pegawai pemerintah dan swasta, pelestarian bahasa dan aksara Bali—terutama penggunaan aksara Bali di papan nama

gedung pemerintah, dan promosi produk-produk lokal Bali bergaya proteksionis.

Munculnya kebijakan-kebijakan demikian “mengisyaratkan adanya kebutuhan akan pertahanan diri sosial-budaya” (Nordholt, 2010, h. 3). Urgensi akan pertahanan diri timbul akibat kuatnya persepsi ancaman terhadap perekonomian dan budaya Bali. Sejak gelombang besar turistifikasi dan migrasi ke Bali pada dekade 1980-an, ancaman itu disangkakan pada ‘pengaruh luar’ yang secara konkret dipahami sebagai pendatang atau *tamiu*. Namun demikian, pendatang tidak melulu berwujud fisik, melainkan juga gagasan asing yang dianggap tidak sesuai budaya Bali. Pendatang bisa berwujud *fashion*, bahasa asing, agama Islam, produk-produk dari luar pulau, ataupun kontrol kelahiran ‘dua anak.’ Di titik ini, batas antara “yang Bali” dan “bukan Bali” diteguhkan. Dengan mendefinisikan yang bukan diri mereka, orang Bali berupaya mengenali diri mereka “dan menggunakan perbedaan itu sebagai dasar untuk mengontrol akses ke berbagai sumber daya” (Fry, 2007, h. 180). Louis Dow Scisco menyebut fenomena ini sebagai nativisme.

Secara mendasar, nativisme muncul akibat perasaan bahwa “orang asing” mengancam atau akan mengancam hak prerogatif dan posisi “pribumi” (Fry, 2007, h. 6). Agar logika nativis menjadi hegemonik, ia membutuhkan narasi penggolongan tunggal yang dominan (Guia, 2016). Di Bali, logika itu dilembagakan melalui berbagai kebijakan budaya. Secara khusus, kebijakan budaya mengacu pada kebijakan dengan *raison d’être* memproduksi makna (McGuigan, 2003). Kebijakan seperti KB Krama Bali, dengan klaim kekhasannya,

berupaya memproduksi makna tentang ‘Bali’ dan ‘bukan Bali.’ Kebijakan ini mencerminkan bagaimana ‘rasionalitas pemerintah’ bekerja untuk mengendalikan populasi dengan memproduksi identitas eksklusif atas nama penegakan tradisi.

Tetapi, perlu diingat bahwa pemerintah tidak bekerja dalam pengertian umum. Untuk mengidentifikasi rasionalitas spesifik itu, penulis mengadopsi konsep *governmentality* yang dirumuskan Foucault untuk menjelaskan sifat-sifat praktik pemerintahan (Gordon, 1991, h. 3). Dengan memberi perhatian khusus pada mentalitas, bahasa, dan idiom yang digunakan dalam kebijakan-kebijakan di mana masalah dan aspirasi politik muncul (Walters & Haahr, 2005, h. 5), dalih politis yang tertanam dalam cara kerja pemerintahan dapat dipahami.

2. KAJIAN PUSTAKA

Keluarga Berencana Krama Bali sebagai Kebijakan Budaya

Budaya secara khusus merujuk pada praktik dan institusi di mana komunikasi simbolik adalah tujuan utama (McGuigan, 2003). Dengan demikian, kebijakan budaya tidak semata berurusan dengan administrasi kebudayaan, tapi juga “pandangan dunia yang mendefinisikan karakter masyarakat dan bagaimana mereka mendefinisikan diri” (Mulcahy, 2017, h. viii). Mengacu pada konsepsi itu, KB Krama Bali dapat dikategorikan kebijakan budaya. Meski secara prinsip merupakan kebijakan kontrol kelahiran, tetapi penggunaan atribut tradisi Bali secara eksklusif, dalam konfigurasi demografi Bali yang kian heterogen, menunjukkan upaya pemerintah merekonsiliasi identitas budaya yang bersaing (Bali dan non-Bali) dengan mengangkat “tradisi”

sebagai esensi beleid. Tujuannya tidak lain meneguhkan identitas persatuan subnasional dalam garis-garis primordial dan kewilayahan.

Analisis Kebijakan Kritis

Analisis kebijakan kritis (*critical policy analysis*, selanjutnya ditulis CPA) secara serius mengadopsi dimensi linguistik, ideasional dan normatif dari kebijakan publik, dan menaruh perhatian pada sistem makna (Löwbrand & Stripple, 2015, h. 92). Benang merah dari paradigma kritis adalah asumsi bahwa kekuasaan memainkan peran dalam membangun pengetahuan sosial (Fischer, 2003 dalam Brewer, 2014). Maka, salah satu masalah pokok bagi studi kebijakan kritis adalah sifat pengetahuan, baik pengetahuan dalam membentuk maupun melaksanakan kebijakan (Fischer et al., 2015, h. 1). Sebagai proyek kritis, CPA berkaitan erat dengan perkembangan teori kritis umumnya (Brewer, 2014). Dari Foucault, CPA mengadopsi teori wacana dan *governmentality*. Foucault tidak menawarkan teori substantif soal kekuasaan yang membentuk kebijakan publik (aktor, kepentingan, struktur), tidak pula mendefinisikannya (Fischer et al., 2015, h. 13). Peran utama analisis kebijakan Foucauldian adalah menginterogasi bagaimana ruang politik ini muncul, bagaimana kekuasaan beroperasi melalui kebijakan publik dan, pada akhirnya, menjelaskan bagaimana kebijakan publik selalu bersifat kontekstual (Fischer et al., 2015, h. 14).

Governmentality

Istilah *governmentality* merujuk pada domain yang disebut Foucault 'rasionalitas pemerintah' (Gordon, 1991, h. 1), yaitu cara dan sistem pemikiran tentang sifat-sifat praktik pemerintahan yang mampu membuat kegiatan itu dapat dipikirkan dan dipraktikkan (Gordon, 1991, h.

3). *Governmentality* digunakan Foucault untuk menyelidiki hubungan antara teknologi dominasi dan teknologi diri. Teknologi dominasi mengacu pada teknik untuk "mengatur perilaku individu, untuk memaksakan maksud atau tujuan tertentu" (Foucault, 1997d, h. 177); sementara teknologi diri berkaitan dengan kapasitas individu untuk melakukan kontrol atas dirinya. Pusat perhatian *governmentality* adalah populasi (Walters & Haahr, 2005, h. 10). Mengingat mustahil mengatur tindakan setiap individu secara mendetail di tingkat populasi, pemerintah beroperasi dengan cara mendidik hasrat dan mengatur kebiasaan, kepercayaan dan aspirasi (Li, 2007). Praktik demikian memungkinkan pemerintah mengatur berbagai hal sehingga orang, "[seolah] mengikuti kepentingan mereka sendiri, akan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan" (Scott, 1995 dalam Li, 2007). Inilah yang disebut Foucault "*the conduct of conduct.*" Sebagai peralatan analisis, Walters dan Haahr (2005) merumuskan *governmentality* menjadi empat jenis: 1) bentuk khusus dari analisis politik kritis dan reflektif yang berfokus pada mentalitas pemerintah; 2) penyelidikan historis dari perubahan bentuk kekuasaan; 3) tematisasi relasionalitas kekuasaan dan iden-titas terperintah; dan 4) persoalan teknologi kekuasaan.

Nativisme

Nativisme adalah mekanisme penarikan batas antara "kami"/"mereka" dalam garis asal-usul demi menjustifikasi privilese bagi kelompok tertentu (Guia, 2016). Melalui suatu proses kolektif, kelompok itu menandai batas-batas "pribumi" *vis-à-vis* "orang asing." Dalam prosesnya, kelompok ini menyediakan kerangka tafsir dan tindakan bagi para pendaku pribumi. Guia (2016) menekankan bahwa nativisme

hanya bisa muncul bila unit politik berada dalam kondisi migrasi massal atau keragaman budaya internal. Ia merumuskan lima karakteristik nativisme: (a) pendatang atau etnis minoritas dikonstruksi sebagai anca-man bagi 'pribumi'; (b) pribumi menganggap budaya beroperasi dalam logika *zero-sum*; (c) migran atau minoritas dianggap mengancam nilai-nilai pribumi; (d) prioritas hak pribumi; dan (e) narasi penggolongan tunggal. Sementara Betz (2019) menerangkan nativisme simbolik yang meyakini pemerintah harus melindungi identitas budaya pribumi. Dalam pandangan ini, nativisme merupakan mekanisme defensif yang berfungsi untuk melindungi "warisan berharga" yang diduga tengah terancam.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif *governmentality* dan paradigma CPA. *Governmentality* menawarkan pendekatan kritis pada riset politik dengan memberi perhatian khusus pada mentalitas pemerintahan (Walters & Haahr, 2005, h. 5). Konsep nativisme berguna untuk memahami bagaimana kepengaturan beroperasi dengan mengkategorisasi 'pribumi' dan 'pendatang.'

Unit analisis adalah kebijakan KB Krama Bali. Data primer berupa dokumen Ingub Bali No. 1545 tentang Sosialisasi Program KB Krama Bali; sementara data sekunder berupa berita-berita terkait di media massa. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Hasil temuan dan analisis kemudian disajikan secara naratif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum KB Krama Bali

Ingub Bali No. 1545 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali

ditetapkan pada 14 Juni 2019 oleh Gubernur Bali I Wayan Koster. Ada tiga pertimbangan: 1) KB Krama Bali ditujukan untuk "mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan" orang Bali; 2) KB Krama Bali mengatur hal-hal pada poin pertama dengan "tetap menghormati hak reproduksi Krama Bali berdasarkan kearifkan lokal"; dan 3) hak reproduksi *krama* Bali adalah hak "melahirkan anak lebih dari dua orang bahkan empat orang yang penyebutannya terdiri atas *Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut*" atau sebutan lain. Merujuk UU No. 52/2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga dan UU No. 23/2014 tentang Pemda, Gubernur Bali menginstruksikan walikota dan bupati se-Bali untuk: 1) menyetop kampanye KB 'dua anak'; 2) menyosialisasikan KB Krama Bali; dan 3) sosialisasi harus dilaksanakan sebagai implementasi visi pembangunan Provinsi Bali "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali.*"

KB Nasional 'Dua Anak' di Bali

Program KB nasional diluncurkan pada 1970, bersamaan dengan berdirinya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Tujuan program ini adalah menekan pertumbuhan penduduk (Streathfield, 1982, h. 122) melalui inseminasi norma NKKBS (Nilai Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera) dan *catur warga* (orangtua dengan dua anak). Di Bali, sebelum ada KB pemerintah, kegiatan KB telah dimulai sejak 1961 dengan pendirian cabang Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Tetapi, dari 1961 hingga 1969, jumlah akseptor kecil; kurang dari 3 persen (Astawa, 1980 dalam Streathfield, 1982, h. 124). Situasi berubah setelah pemerintah terlibat. Program KB mengerahkan Kementerian Kesehatan, Departemen Penerangan, Ke-

menterian Agama, dan Angkatan Bersenjata. Badan swasta yang terlibat antara lain PKBI dan tiga organisasi keagamaan—Dharma Dutta (Hindu), Dewan Gereja-gereja di Indonesia (Kristen), dan Muhammadiyah (Islam) (Streathfield, 1982, h. 125). Memasuki tahun 1974, program KB mulai berbasis *banjar*. Ada tiga alasan pelibatan *banjar* (Streathfield, 1982, h. 130): 1) untuk melembagakan norma NKKBS melalui sistem *banjar*; 2) untuk mencatat statistik akseptor dan peserta program; 3) sistem ini merupakan rute pasokan kontrasepsi paling ideal.

Sejak penerapan program KB nasional di Bali, prevalensi kontrasepsi meningkat drastis. Prevalensi naik dari 6,6 persen pada 1971 menjadi 53,7 persen pada 1981, dengan peningkatan lebih dari 100 persen di tahun pertama (Streathfield, 1982, h. 137). Pada 2019, prevalensi telah mencapai 67,3 persen (Pusdatin Kemkes, 2020). Naiknya prevalensi berdampak pada penurunan *total fertility rate* (TFR). TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama usia subur. Pada 1980, TFR Bali 3,97. Tahun 1997, TFR Bali sudah 1,89. Sejak 1971, TFR Bali selalu lebih rendah ketimbang TFR nasional (BPS, 2014). Keberhasilan program KB juga tercermin dari perlambatan pertumbuhan penduduk Bali. Pertumbuhan penduduk turun dari 1,77 persen pada 1961-71 menjadi 1,54 persen pada 1971-80. Antara 1980-1990, lajunya hanya 1,18 persen, titik terendah sejak program KB. Banyak ahli mengaitkan keberhasilan Bali dengan efektivitas sistem *banjar* (Pringle, 2004, h. 197). Keberhasilan itu turut difasilitasi promosi yang menyebut program ini dirancang “oleh orang Bali, untuk orang Bali” (Streathfield, 1982, h. 149).

Meski berhasil mengidealisasi postur keluarga kecil, program KB Orba segera goyah setelah rezim itu tumbang. Setelah Reformasi, muncul penolakan KB ‘dua anak’ di Bali. Ada kecurigaan bahwa program KB merupakan upaya agama mayoritas secara bertahap meniadakan Hindu—kecurigaan yang sebetulnya sudah ada sejak pengenalan KB (Streathfield, 1982, h. 149). Penolakan KB nasional kemudian menemukan bentuknya dalam wacana KB Bali ‘empat anak.’

Sentimen Antipendatang

Pada akhir 1990-an, terjadi lonjakan arus pendatang ke Bali. Kehadiran kaum pendatang telah mengubah konfigurasi demografi Bali. Provinsi kecil yang dulu homogen, perlahan menjadi heterogen di ruang-ruang tertentu (Dwipayana, 2010). Sensus tahun 2000 mencatat, dari total 3,1 juta penduduk, ada sekitar 250.000 migran asal Jawa dan Madura di Bali (Nordholt, 2010, h. 48). Dari segi komposisi penganut agama, kendati penduduk Hindu tetap mayoritas, persentasenya terus menurun. Pada 1980, penduduk Hindu mencapai 93 persen; pada 1990 turun menjadi 90,3 persen; 87,4 persen pada 2000; dan 83 persen pada 2010 (BPS, 2018).

Sikap orang Bali terhadap situasi ini tergolong ambivalen. Di satu sisi, kehadiran pendatang diperlukan untuk memenuhi konsumerisme orang Bali yang meningkat seiring perkembangan ekonomi pariwisata (Burhanuddin, 2008, h. 96). Mereka yang dibutuhkan adalah pekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, jamu, dan sejenisnya. Di sisi lain, keberadaan mereka dianggap ancaman. Para pendatang kerap dikaitkan dengan persoalan kriminalitas. Mereka dicap pencemar sosial dan perusak

citra pariwisata Bali yang tenang, damai, dan aman (Burhanuddin, 2008, h. 97).

Situasi tidak membaik setelah rezim Orba jatuh. Di Bali, semangat 'kebebasan pasca-Soeharto' mengejawantah gugatan atas model toleransi warisan lampau. Model toleransi *top-down* yang dibangun dalam suasana represif telah menciptakan kemengalahan sepihak, sehingga bersifat semu (Wijaya, 2012). Aksi teror kelompok *Jemaah Islamiyah* pada 12 Oktober 2002 hanya meneguhkan urgensi atas sikap intoleran itu. Kendati tidak berujung tindak kekerasan terhadap kaum Muslim, penduduk pendatang mengalami represi fisik dan administratif (Nordholt, 2010, h. 49).

Secara sosiologis, sentimen antipendatang tampak dari pergeseran sebutan Muslim sebagai *nyama selam* (saudara Islam) menjadi *jelema selam* (orang Islam) (Burhanuddin, 2008, h. 98). Bila istilah *nyama selam* menunjukkan keakraban; maka *jelema selam* mengisyaratkan keasingan dan sikap merendahkan. Demikian pula *nyame Jawa* yang bergeser menjadi *nak Jawa*—istilah pelecehan bagi orang non-Bali pelaku kejahatan (Nordholt, 2010, h. 50). Persoalan itu menimbulkan ketegangan relasi antara "kita" penduduk lokal (orang Bali) dengan "mereka" pendatang (orang non-Bali) (Burhanuddin, 2008, h. 95). Dalam hal kependudukan, ketegangan itu tampak dalam penolakan KB 'dua anak.' Pembatasan kelahiran dipandang sebagai upaya mengerdilkan kekuatan *krama* Bali sebagai penopang kelestarian budaya Bali. Perasaan terancamnya eksistensi orang dan budaya Bali akibat peningkatan migran membentuk imaji tentang keterpinggiran orang Bali. Pada 2004, intelektual publik Prof. Luh Ketut Suryani telah memproyeksikan suatu masa depan suram

ketika "orang Bali Hindu mungkin menjadi minoritas di tanah mereka sendiri" (Nordholt, 2010, h. 50). Dengan konteks demikian, berkembang narasi KB 'empat anak' yang mengetengahkan penguatan demografi.

Melipatgandakan Krama Bali: Dari 'Dua Anak' ke 'Empat Anak'

Dalam tulisan berjudul "Siapa melestarikan tradisi Bali" (*Tokoh*, edisi 17-22 Juli, 2007 dalam Mudita, 2009), Kak Nges menggugat KB 'dua anak.' Menurutnya, pembatasan kelahiran 'dua anak' telah mengancam kelangsungan tradisi Bali. Ia menyarankan orang Bali untuk memiliki anak hingga empat orang. Kak Ngeh menekankan bahwa "sikap kependudukan" ini merupakan itikad "menjaga tradisi."

Sensitivitas itu pula yang mendasari pemikiran politikus konservatif I Gusti Ngurah Arya Wedakarna. Pada 2011, ketika berpidato di Pura Baturaya, Karangasem, Wedakarna mempersoalkan KB 'dua anak' di Bali yang ia sebut "tak mendukung spirit perkembangan agama Hindu" dan membuat "SDM Bali menjadi habis terkikis" (*Bali Post*, 29 September 2011). Antara 2014 dan 2016, Wedakarna getol mengampanyekan KB Bali 'empat anak.' Ia mendorong generasi muda Bali "mengabaikan program KB nasional" (*Fajar Bali*, 15 Agustus 2014). Ia menekankan urgensi menjaga kelestarian "nama *Nyoman* dan *Ketut* agar bangsa Bali tidak punah" (*Tokoh*, Edisi 957, 12-18 Juni 2017). Demi menjamin eksistensi Hindu, Wedakarna mengajukan "strategi ketahanan Hindu" yang menyorongkan KB Bali 'empat anak,' sikap selektif terhadap migran, ekonomi *sukla satyagraha*, dan kepemilikan tanah Bali hanya oleh orang Bali (*Bali Post*, 25 Agustus 2016). Ia mengingatkan: "Jangan sampai pendatang yang menguasai sektor-

sektor di Bali” (*Tokoh*, Edisi 957, 12-18 Juni 2017).

Pada 2018 eskalasi wacana KB Bali ‘empat anak’ meningkat ketika I Wayan Koster (saat itu Cagub Bali dari PDIP) mengkritik KB ‘dua anak’ dalam satu kampanye di Karangasem. Menurut Koster, selain mengancam generasi *Nyoman* dan *Ketut* (*Bali Post*, 16 Maret 2018), KB ‘dua anak’ juga merugikan Bali soal anggaran. Koster mengatakan: “[Alokasi anggaran] dihitung pada jumlah manusia ... Jadi, semakin sedikit jumlah orang, semakin sedikit pula bantuan yang didapat” (*Bali Post*, 16 Maret 2018). Dalam hal ini, ia merujuk UU No. 33/2004 tentang perimbangan anggaran pusat dan daerah, serta PP No. 55/2005 tentang dana perimbangan. Jumlah penduduk memang menjadi salah satu komponen penentu besaran Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom. Dengan keterangan ini, gagasan KB Bali ‘empat anak’ turut memperoleh dimensi politik anggaran.

Setelah memenangi Pilgub Bali dan dilantik pada 5 September 2018, sikap Koster terhadap KB ‘dua anak’ semakin jelas. Pada 14 Juni 2019 Koster menerbitkan Ingub Bali No. 1545/2019. Isinya memerintahkan bupati dan walikota mengganti kampanye KB ‘dua anak’ dengan KB Krama Bali ‘empat anak.’ Untuk menstimulasi *krama* Bali memiliki empat anak, Pemprov Bali merencanakan pembuatan Kartu KB Krama Bali (*Bali Post*, 14 Juli 2019). Melalui kartu ini, Pemprov Bali akan menyalurkan berbagai bantuan untuk *krama* Bali yang punya empat anak. Kebijakan Koster ini mendapat dukungan dari pejabat dan politisi Bali. Di Badung, Wakil Bupati I Ketut Suiasa meyakinkan masyarakat untuk tidak takut melestarikan

KB ‘empat anak’ (*Bali Post*, 30 Januari 2018). Di Buleleng, Wakil Bupati Nyoman Sutjidra mendorong desa *pakraman* menyukseskan KB ‘empat anak’ demi “adat dan budaya Bali” (*Bali Post*, 16 Juli 2019). Wedakarna, politikus yang getol mempromosikan KB Bali, turut memuji kebijakan Koster (*Bali Post*, 5 April 2019).

KB Krama Bali juga didukung Kelompok Media Bali Post (KMBP), perusahaan media berpengaruh di Bali. KMBP adalah salah satu penggerak *Ajeg Bali*, sebuah gerakan moral yang menekankan pertahanan “kemurnian” budaya Bali dari pengaruh luar. Dalam tajuk rencana berjudul “Generasi Pengawal Peradaban Bali,” 26 Juli 2019, koran *Bali Post* memuji kebijakan-kebijakan Koster—Pergub Tulisan Bali, Pergub Pakaian Adat Bali, dan Ingub KB Krama Bali—yang dinilai “berpihak kepada kepentingan dan kearifan lokal.” Perihal KB ‘empat anak,’ *Bali Post* menulis:

Pemahaman terhadap pentingnya Bali dijaga dan dikawal oleh penduduk pendukung budaya Bali adalah hal mutlak yang harus dibangun ... Bahwa manusia Bali adalah manusia unggul sehingga akan menjadi berkah bagi pembangunan jika jumlahnya semakin banyak ... Yang jelas, kebijakan KB empat anak Bali adalah bagian dari komitmen mengawal warisan leluhur.

Meski peningkatan kuantitas penduduk dianggap urgen bagi ajegnya “peradaban Bali,” *Bali Post* mencatat perlunya peningkatan kualitas SDM Bali. Secara strategis ini penting “untuk mengimbangi kaum pendatang yang masuk ke Bali” (*Bali Post*, 26 Juli 2019).

Respons terhadap Wacana KB Bali ‘Empat Anak’

Sastrawan Bali, Made Adnyana Ole, menyoroti penggunaan jargon “penyelamatan masa lalu” dalam kampanye KB Krama Bali

(*Tribun Bali*, 8 Juli 2019). Baginya, romantisme yang menyarankan pelestarian *Nyoman* dan *Ketut* telah mengesampingkan kondisi faktual demografi Bali yang laju pertumbuhan dan kepadatan penduduknya sudah tinggi.

Sementara itu, akademisi I Ngurah Suryawan (2019) cenderung melihat kebijakan ini dari optik biopolitik dan gender. Menurutnya, seperti KB nasional, KB Krama Bali adalah penyelinapan kekuasaan ke dalam wilayah privat manusia. Terlebih, kebijakan ini tidak sensitif gender. Dalam persoalan jumlah anak, baik 'dua anak' maupun 'empat anak,' sosok ibu hanya menjadi objek. Suryawan (2019) juga menilai KB Krama Bali sarat "nuansa membangun benteng" perlindungan terhadap ancaman luar. Dengan strategi pembentengan identitas itu, orang Bali tetap merasa dominan di wilayahnya.

Hal senada muncul dalam acara diskusi radio mengenai KB 'empat anak.' Seorang audiens menggugat "pengaturan" jumlah anak (*Bali Post*, 1 Desember 2018). Baginya, keputusan beranak ada pada keluarga terkait. Salah satu parameternya adalah kemampuan finansial. Dua audiens lain mengamini pendapat itu sembari menekankan aspek kualitas keluarga. Menurut mereka, kualitas keluarga akan terjamin bila biaya pendidikan dan kesehatan terjangkau. Protes lain muncul dalam acara *Warung Global* pada 20 September 2019. Seorang audiens menyebut KB Krama Bali potensial menimbulkan kerusakan lingkungan. Baginya, peningkatan populasi bakal mendesak pembukaan permukiman baru yang boleh jadi mendorong laju alih fungsi lahan hijau (*Bali Post*, 21 September 2019).

Perkembangan isu KB Krama Bali di media membuat Kepala BKKBN Hasto Wardoyo

merasa perlu bertemu gubernur Bali. Hasto menyebut KB 'empat anak' "tidak sesuai spirit di nasional" (*Tribun Bali*, 1 Oktober 2019). Spirit yang dimaksud adalah target mencapai TFR nasional 2,1. Menurut Hasto lagi, norma 'dua anak' tidak terbantahkan (*Beritasatu*, 10 Agustus 2019), mengingat risiko kematian ibu dan anak meningkat pada kehamilan atau kelahiran anak ketiga dan seterusnya. Kendati begitu, Hasto mengatakan bahwa KB Krama Bali masih bisa "disiasati agar tidak bertabrakan" dengan kebijakan nasional (*Liputan6*, 21 Agustus 2019). Hasto menyebut ada 10 persen pasangan tidak bisa punya anak dan 15 persen pasangan memiliki satu anak di Bali. Bila KB Krama Bali jadi dilaksanakan, Pemprov Bali disarankan menasar kelompok tersebut.

Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Bali Catur Sentana mengingatkan Koster untuk menimbang kesehatan reproduksi, daya dukung ekonomi, dan daya tampung, selain aspek kultural (*Bali Post*, 14 Juli 2019). Mengenai hal itu, Koster berkilah bahwa jumlah anak bukan lagi masalah sebab urusan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pangan sudah ditanggung negara (*Bali Post*, 29 Juni 2019). Kendati dikritik BKKBN, Koster mengaku tidak akan mencabut kebijakan itu (*Bali Post*, 14 Juli 2019).

KB Krama Bali: Budaya Siaga dan Upaya Menyiagakan Demografi

Imajinasi atas ancaman dari luar telah menimbulkan kecemasan dalam benak orang Bali. Hal ini berujung pada hadirnya strategi 'budaya siaga' (Santikarma, 2003; Dwipayana, 2010; Nordholt, 2010, h. 37-50). Kesiagaan dipromosikan melalui dua seruan (Scarpello, 2017): 1) mendorong orang Bali memperkuat budaya mereka melalui revitalisasi nilai dan

lembaga tradisional; 2) menyerukan orang Bali mempertahankan pulaunya dari ancaman luar berupa pendatang Muslim Jawa, pemerintah pusat, investor non-Bali, dan budaya “asing.”

Namun demikian, penyiagaan “bukan persoalan konstruksi ‘ancaman’ semata,” tapi juga mengenai konstruksi identitas orang-orang ‘yang terancam’ dan ‘yang mengancam’ (Walter dan Haahr, 2005, h. 98). Dalam konteks KB Krama Bali, penyiagaan memerlukan kategorisasi *krama* Bali dan non-*krama* Bali. ‘Budaya siaga’ di Bali bercorak nativis. Paham itu berkaitan dengan wacana keunikan dan otentisitas Bali—Picard menyebutnya *kebalian*. Menurut Picard (1999, h. 17), wacana ini muncul seiring persentuhan orang Bali “dengan Liyan yang kuat dan mencolok.” Gagasan otentisitas Bali mengandaikan budaya Bali statis, tertutup, dan ‘murni.’ Akibatnya, persentuhan dengan budaya atau agen budaya lain dipandang curiga. Otentisitas Bali kian penting sejak pariwisata Bali *booming* pada 1980-an. Otentisitas menjelma atraksi menarik bagi turisme global. Karenanya, saat kelompok *Jemaah Islamiyah* melakukan teror bom di Legian pada 12 Oktober 2002, aksi itu dipahami bukan hanya sebagai perusak keamanan, tapi juga ekonomi pariwisata dan otentisitas Bali. Sejak itu, istilah ‘keamanan’ tidak cuma merujuk tindak kriminal atau teror; namun mencakup budaya, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Di saat yang sama, aksi teror mengilhami gerakan moral pembentengan identitas bernama *Ajeg Bali*. Gerakan ini menawarkan kesiagaan yang dikonstruksi dalam oposisi kita/mereka atau asli Bali/bukan Bali. Kategori pertama mewakili keotentikan identitas yang perlu pengamanan dan pengutamakan; kategori kedua merujuk pada

pendatang (orang dan gagasan) yang asing dan mengancam. Dengan mem-pertentangkan dua kategori itu, identitas ‘yang terancam’ dan ‘mengancam’ menjadi jelas.

Untuk memupuk kesiagaan, dikenalkanlah sejumlah situs ketakutan. Tamatea (2011) mengidentifikasi ketakutan-ketakutan itu pada empat situs: agama, *border-patrol*, lingkungan, dan generasi muda. Pada domain agama muncul proyeksi suram mengenai kehancuran Hindu, ancaman Islamisasi, dan perpecahan umat. Istilah *border-patrol* mengacu pada upaya menjaga ‘kemurnian’ Bali dengan menetapkan batas etnis melalui pembatasan identitas orang Bali hanya pada Hinduisme. Secara ekonomi, *border-patrol* berfungsi untuk menjamin penguasaan sumber daya tertentu oleh orang ‘asli’ Bali. Domain lingkungan menyangkut dampak peningkatan ‘orang luar’ terhadap ruang hidup orang Bali. Ujungnya, berbagai ketakutan tadi mengerucut pada gagasan tentang masa depan Bali, yang tentu saja, diproyeksikan pada generasi muda. Sayangnya, dalam pandangan penganjur ‘budaya siaga’ yang konservatif, generasi muda Bali hari-hari ini berada dalam kondisi mencemaskan. Kualitas mereka dianggap mundur. Kualitas itu menyangkut pemahaman tentang tradisi Bali dan kesetiaan pada doktrin otentisitas Bali (Tamatea, 2011). Dari segi kuantitas, generasi muda Bali diproyeksikan bakal menghadapi ancaman serius. Sebabnya dua hal: 1) pertumbuhan penduduk ‘asli’ Bali mandek sejak ada KB ‘dua anak’; 2) peningkatan pendatang seiring perkembangan ekonomi pariwisata. Dengan asumsi budaya Bali hanya hidup di lingkup masyarakatnya sendiri, maka eksistensi orang Bali dalam kuantitas tertentu dengan sendirinya menjadi prasyarat.

Pendeknya, 'kelestarian' penduduk Bali paralel dengan kelestarian budaya Bali.

Dengan demikian, isu kependudukan telah menjadi sentral dalam sengkabut persoalan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di Bali. Secara *en masse*, seluruh ketakutan di atas hadir (atau dihadirkan) dalam sebuah situs yang menyangkut ancaman keterpinggiran, keterdesakan, atau kepunahan orang Bali: suatu 'ketakutan demografi.' Dalam konteks inilah KB Krama Bali mengambil tempat. Kebijakan ini adalah implikasi dari narasi ancaman pendatang terhadap pribumi (Guia, 2016). KB Krama Bali merespons persoalan demografi dengan paham yang bersumber dari dan bekerja demi cita-cita "Bali dikontrol oleh orang Bali" (Scarpello, 2017).

Sembari melingkupi dirinya dengan atribut tradisi, KB Krama Bali menawarkan 'solusi' atas ancaman demografi melalui strategi yang menekankan parameter-parameter kuantitatif. Bila KB nasional 'dua anak' mengklaim upaya kualitatif untuk mensejahterakan keluarga Indonesia, maka KB Krama Bali 'empat anak' menawarkan solusi kuantitatif, menggiring orang 'asli' Bali 'melipatgandakan' jumlahnya dari 'dua anak' ke 'empat anak.' Hal ini penting secara politik dan ekonomi. Itu tercermin dari keterangan Koster yang menyebut "populasi orang Bali akan cepat habis" bila mengikuti program KB 'dua anak' (*Media Indonesia*, 28 Juni 2019). Ia juga menyinggung kerugian Bali dalam hal DAU akibat jumlah penduduk yang sedikit (*Bali Post*, 16 Maret 2018).

Proyeksi keterpinggiran menjadi dalih pemerintah menerbitkan kebijakan bercorak nativis. Pembangunan situs ketakutan dan ancaman memperkuat batas 'orang Bali' dan 'bukan Bali.' Dengan meneguhkan yang Liyan

sebagai ancaman, 'subjek terancam' diarahkan menjadi 'subjek diperintah' melalui dalih-dalih kepentingan 'orang asli Bali.'

Klaim Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut sebagai Kontrol Kelahiran

Nativisme simbolik meyakini pemerintah harus "mempertahankan identitas budaya" pribumi (Betz, 2019). Dalam pandangan ini, nativisme adalah mekanisme defensif untuk melindungi "warisan berharga" yang diduga terancam. Dalam konteks KB Krama Bali, warisan berharga itu adalah kebiasaan orang Bali menandai urutan kelahiran anaknya dengan sebutan *Wayan/Gede/Putu* (anak pertama), *Made/Kadek/Nengah* (anak kedua), *Nyoman/Komang* (anak ketiga), dan *Ketut* (anak keempat). Ancaman datang dari KB 'dua anak' yang mempromosikan NKKBS dan *catur warga*. Sejak 1970, program ini sukses menekan TFR Bali rata-rata di angka 2,1. Konsekuensinya, nama *Nyoman* dan *Ketut* menjadi jarang dan hampir "punah" (*Tokoh*, Edisi 957, 12-18 Juni 2017; *Bali Post*, 14 Juli 2019). Gubernur Bali bahkan mengklaim *Nyoman* dan *Ketut* sebagai "warisan leluhur yang begitu arif" sehingga perlu dilestarikan (*Bali Express*, 27 November 2019).

Meski konsep keluarga 'dua anak' tidak mengakomodasi tradisi penamaan orang Bali, KB nasional sempat memasyarakat di Bali. Sebabnya, selain efektivitas KB *banjar*, adalah promosi yang menyebut program ini dirancang "oleh orang Bali, untuk orang Bali"; klaim yang jelas keliru. Faktanya, banyak orang non-Bali terlibat (Streathfield, 1982, h. 149).

Gagasan perlindungan tata nama Bali berkembang merespons naiknya presensi migran. Dalam hal ini, migrasi harus dipahami sebagai perpindahan kultural. Kehadiran

pendatang beserta atribut sosial dan budaya mengusik kesadaran komunal orang Bali. Pendaku 'asli' Bali memahami budaya dalam logika *zero-sum* (Guia, 2016). Akibatnya, migran beserta atribut budayanya dianggap "polusi kebudayaan" Bali (Picard, 1999, h. 15).

KB Krama Bali: Governmentality dan Teknologi Penggolongan

Governmentality berguna untuk menyelidiki kapasitas otonom individu dalam melakukan kontrol diri dan bagaimana hal itu berkaitan dengan tatanan politik. Dalam konteks KB Krama Bali, kontrol diri terpaut dengan teknik mereproduksi makna 'menjadi orang Bali.'

KB Krama Bali mereproduksi identitas kebalian melalui *biomarker* atau 'penanda biologis' berupa tata nama dan jumlah anak (Palsson, 2014). Dua hal itu diklaim sebagai 'warisan berharga' yang patut diproteksi. Konstruksi identitas 'orang Bali' ideal dalam kebijakan ini adalah mereka yang punya empat anak dan menamai mereka sesuai sistem penamaan leluhur orang Bali. Namun demikian, teknologi diri dapat pula dipahami sebagai "perkara menempatkan yang imperatif ke dalam 'pemahaman atas diri sendiri'" (Foucault, 1997c, h. 87). Tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai dengan menuntun suatu identitas diri.

KB Krama Bali mengisyaratkan prosedur yang menawarkan 'kebebasan.' Kebijakan ini tidak bersifat imperatif. KB Krama Bali "tidak mewajibkan masyarakat memiliki empat anak. Namun, hanya sebatas menganjurkan" (*Bali Post*, 14 Juli 2019). Meski *krama* Bali bebas menentukan turut serta atau tidak, terdapat konsekuensi tak langsung yang perlu diperhatikan. Para 'pembangkang' kebijakan ini potensial diganjar label peyoratif akibat

amplifikasi narasi proteksi tradisi, yakni dicap "pengkhianat budaya Bali." Ini mengisyaratkan adanya upaya penggolongan dengan narasi tunggal (Guia, 2016).

Perlu dicatat bahwa *governmentality* menysar populasi atau tubuh sosial. Dengan itu, teknologi yang diterapkan tidak terbatas pada teknologi dominasi yang mengandalkan fungsi wacana sebagai rezim kebenaran. Di sini, bekerja apa yang disebut Foucault problematisasi. Problematisasi berkehendak mengonstruksi realitas dalam ruang definisi normalitas. Pengetahuan tentang yang normal diciptakan dengan terlebih dulu mendefinisikan yang abnormal.

Dalam konteks KB Krama Bali, aktor dominan menghadirkan pandangan bahwa realitas yang dihadapi *krama* Bali merupakan realitas yang bermasalah. Kehidupan orang Bali digambarkan goyah akibat kehadiran pendatang. Peningkatan presensi pendatang beserta budayanya dianggap mengancam 'kemurnian' Bali. Terlebih, mereka kerap dikaitkan dengan tindak kriminal. Ketegangan yang timbul lantas mengusik kesadaran orang Bali terkait penguasaan lahan, kelestarian agama Hindu, otentisitas budaya, maupun dominasi di pulauanya. Situasi diperparah oleh stagnasi pertumbuhan penduduk akibat kesuksesan KB 'dua anak.' Program ini bahkan diproyeksikan menyebabkan 'kepunahan' tradisi penamaan orang Bali. Di sisi lain, bila orang Bali terus mengikuti KB 'dua anak', orang Bali akan merugi dari segi anggaran (*Bali Post*, 16 Maret 2018).

Pendatang digambarkan sedemikian rupa sebagai ancaman terhadap orang dan budaya Bali. Media massa turut andil dalam mengonstruksi 'realitas' Bali yang demikian

suram. Koran *Bali Post*, misalnya, pada 2002 merilis artikel yang secara kontroversial menyimpulkan setiap 1,5 jam, satu kejahatan dilakukan oleh pendatang (Nordholt, 2010, h. 48). Pada 2019, koran itu menulis soal perlunya melakukan penguatan penduduk lokal demi “mengimbangi kaum pendatang yang masuk ke Bali” (*Bali Post*, 26 Juli 2019).

Dalam ‘kekacauan’ itu, pandangan yang mendorong penguatan identitas *kebalian*, dimunculkan sebagai strategi ‘normalisasi.’ Gagasan ‘empat anak’ muncul menawarkan suatu ‘kepercayaan-diri’ kolektif. Dengan melipatgandakan diri dari ‘dua anak’ ke ‘empat anak’ orang Bali berupaya menjaga dominasi di pulaunya. Wacana KB Bali ‘empat anak’ muncul sebagai ekspresi ketidakpuasan atas kondisi demografi Bali. Melihat ‘kekacauan’ akibat serbuan pendatang, masuknya modal asing, dan komodifikasi budaya Bali, di kalangan cendekiawan Bali “muncul kebutuhan akan revitalisasi spiritual dan penguatan rasa percaya-diri kultural” (Nordholt, 2010, h. 2). Gagasan konservatif itu cepat memasyarakat berkat sokongan media massa, utamanya KMBP. Wacana KB Bali ‘empat anak’ kemudian ditangkap oleh politikus seperti Wedakarna. Sepanjang 2011-2019, ia gencar mempromosikan KB Bali ‘empat anak.’ Namun, wacana ini baru memperoleh momentum ketika salah satu Cagub Bali 2018, I Wayan Koster, mengkritik KB ‘dua anak.’ Setelah menang Pilgub Bali dan resmi menjabat, pada 2019 Koster menerbitkan Ingub Bali No. 1545/2019 tentang KB Krama Bali. Konsiderannya menyinggung hak reproduksi perempuan Bali hingga empat anak. Terbitnya KB Krama Bali menandai institusionalisasi wacana KB Bali ‘empat anak.’

Otentisitas menjadi ‘dalih’ demi mengamankan kepentingan lain seperti pemertahanan dominasi Hindu, penguasaan sumber daya ekonomi oleh orang Bali, maupun kepentingan politik elektoral. Dengan berlindung di balik dalih pelestarian budaya, kuasa pengaturan beroperasi di kejauhan, sehingga *krama* Bali “tidak perlu menyadari bagaimana atau mengapa perilaku mereka diatur” (Li, 2007). Dengan begitu, orang ‘asli’ Bali sebagai subjek terperintah dapat digiring untuk bertindak sebagaimana seharusnya orang Bali sesuai definisi yang disediakan pemerintah.

5. KESIMPULAN

Mengikuti kerangka kerja Guia (2016) dan Betz (2019) mengenai karakteristik nativisme, ditemukan dua elemen penting dalam kebijakan ini. Pertama, KB Krama Bali diklaim sebagai solusi atas ancaman keterpinggiran orang Bali akibat penambahan pendatang. Dengan itu, kebijakan ini hendak membangun sikap ‘siaga demografi.’ Kedua, berlaku logika *zero-sum* yang memposisikan budaya migran sebagai ancaman bagi “warisan berharga” tata nama orang Bali. Pendatang berwujud abstrak (KB ‘dua anak’) dan konkret (migran non-Bali). Dengan melacak perkembangan wacana KB Bali, dapat dipahami bahwa dua elemen tadi beririsan dengan kepentingan mengamankan cita-cita “Bali dikontrol oleh orang Bali.”

Dalam konteks itu, KB Krama Bali digunakan sebagai “teknik paksaan” yang beroperasi tanpa secara langsung “memaksa.” Dengan menekankan bahwa jumlah ‘empat anak’ hanya sebatas ‘anjaran,’ kebijakan ini seolah menyediakan ruang ‘kebebasan,’ sehingga “paksaan” dapat dioperasikan dari jarak aman. Pengaturan dilakukan dengan memanufaktur subjek terperintah. Hal itu

dicapai dengan menyediakan kerangka tafsir mengenai bagaimana 'menjadi orang Bali' melalui penggunaan *biomarker* berupa tata nama dan jumlah anak yang diklaim 'khas' Bali.

Peningkatan visibilitas pendatang dikonstruksikan sebagai ancaman bagi eksistensi orang dan budaya Bali. Aktor dominan lantas mengintervensi persoalan dengan menawarkan solusi yang dapat diterima orang Bali. Solusi yang ditawarkan adalah kebijakan kontrol kelahiran yang menekankan kuantitas sebagai kekuatan komunal dan diklaim bersumber dari nilai-nilai tradisi. Telah ditunjukkan bahwa KB Krama Bali bertautan dengan sengkabut persoalan pendatang, penguasaan ruang, dan dominasi agama Hindu. Dalam derajat tertentu, seluruh persoalan itu bersentuhan dengan wacana otentisitas budaya Bali.

6. DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2014). *Angka Fertilitas Total menurut Provinsi*. Diakses 15 Mei 2020, dari <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1271/angka-fertilitas-total-menurut-provinsi-1971-1980-1985-1990-1991-1994-1997-1998-1999-2000-2002-2007-2010-dan2012.html>
- BPS. (2018). *Penduduk Provinsi Bali Menurut Agama yang Dianut*. Diakses 20 Mei 2020, dari <https://bali.bps.go.id/statictable/2018/02/15/33/penduduk-provinsi-bali-menurut-agama-yang-dianut-hasil-sensus-penduduk-2010.html>
- Bali Express. (27 November 2019). *Koster Ingin Terapkan "KB Bali", Stop Kampanye "Dua Anak Cukup"*. Diakses 19 Desember 2019, dari <https://baliexpress.jawapos.com/read/2018/11/27/105526/koster-ingin-terapkan-kb-bali-stop-kampanye-dua-anak-cukup>
- Bali Post. (29 September 2011). *Wedakarna Dorong Krama Bali Lestarikan Empat Anak*. Bali Post. (25 Agustus 2016). *Ribuan Warga Desa Adat Mayungan Sambut Wedakarna*.
- Bali Post. (30 Januari 2018). *Balitbang Badung Gelar Rapat Koordinasi Kelitbangan*.
- Bali Post. (16 Maret 2018). *Jaga Kelestarian Budaya, Koster Gagas KB 4 Anak di Bali*.
- Bali Post. (1 Desember 2018). *Jumlah Anak Jangan Diatur*.
- Bali Post. (5 April 2019). *Perda Desa Adat Disahkan, Berharap Ada Aturan Penduduk Pendatang dan Aman dari Saber Pungli*.
- Bali Post. (29 Juni 2019). *Keluarkan Instruksi KB Empat Anak, Koster Minta Masyarakat Tak Perlu Khawatir*.
- Bali Post. (14 Juli 2019). *Soal KB Krama Bali: Solusi Jaga Angka Kelahiran, Koster Tekad Jalan Terus*.
- Bali Post. (14 Juli 2019). *Tak Perlu Takut Punya Empat Anak*.
- Bali Post. (16 Juli 2019). *Desa Pakraman Diminta Lestarikan KB Bali*.
- Bali Post. (26 Juli 2019). *Tajuk Rencana: Generasi Pengawal Peradaban Bali*.
- Bali Post. (21 September 2019). *Ahli Harus Beri Solusi*.
- Beritasatu. (10 Agustus 2019). *Kepala BKKBN: Dua Anak Cukup Tidak Bisa Dibantah*. Diakses 15 Februari 2020, dari <https://www.beritasatu.com/nasional/568960-kepala-bk-kbn-dua-anak-cukup-tidak-bisa-dibantah>
- Betz, H. G. (2019). Facets of nativism: a heuristic exploration. *Patterns of Prejudice*, 53 (2), 111-135. DOI: 10.1080/0031322X.2019.1572276
- Brewer, C. A. (2014). Historicizing in critical policy analysis: the production of cultural histories and microhistories. *International Journal of Qualitative Studies in Education*,

- 27(3), 273-288. DOI: 10.1080/09518398.2012.759297
- Burhanuddin, Y. M. (2008). *Bali yang Hilang: Pendetang, Islam, dan Etnisitas di Bali*. Yogyakarta: Kanisius.
- Dwipayana, A. A. (2010). Melewati Benteng Ajeg Bali. Dalam H. S. Nordholt, *Bali Benteng Terbuka 1995-2005* (h. xiii-xxix). Denpasar: Pustaka Larasan.
- Fajar Bali. (15 Agustus 2014). *Abhiseka Raja Majapahit Bali Ingatkan Lestarian KB Bali*.
- Fischer, F., Torgerson, D., Durnová, A., & Orsini, M. (2015). *Handbook of Critical Policy Studies*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. DOI: 10.4337/9781783472352
- Foucault, M. (1997c). Subjectivity and Truth. In P. Rabinow (Ed.), *Ethics: Subjectivity and Truth* (h. 87-92). New York: The New.
- Foucault, M. (1997d). Sexuality and Solitude. Dalam P. Rabinow (Ed.), *Ethics: Subjectivity and Truth* (h. 175-184). New York: The New Press.
- Fry, B. N. (2007). *Nativism and Immigration: Regulating the American Dream*. (S. J. Rumbaut, Ed.) New York: LFB Scholarly Publishing LLC.
- Gordon, C. (1991). Governmental Rationality: An Introduction. Dalam G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), *The Foucault Effect: Studies in Governmentality* (h. 1-52). Chicago: The University of Chicago Press.
- Guia, A. (2016, September 26). *The Concept of Nativism and Anti-Immigrant Sentiments in Europe*. Diakses 12 Oktober 2020 dari <https://cadmus.eui.eu/handle/1814/434>
- Instruksi Gubernur Bali Nomor 1545 Tahun 2019. (14 Juni 2019). Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali.
- Pusdatin Kemenkes RI. (2020). *Profil Kesehatan Indonesia 2019*.
- Kompas. (5 Juli 2019). *Selamatkan "Nyoman" dan "Ketut," Gubernur Bali Hentikan Program KB Dua Anak Cukup*. Diakses 18 Desember 2019, dari <https://regional.kompas.com/read/2019/07/05/14092941/selamatkan-nyoman-dan-ketut-gubernur-bali-hentikan-program-kb-dua-anak-cukup>
- Lemke, T. (2016). *Foucault, Governmentality, and Critique*. New York: Routledge.
- Li, T. M. (2007). Governmentality. *Anthropologica*, 49(2), 275-281. DOI: 10.2307/25605363
- Liputan 6. (21 Agustus 2019). *Kepala BKKBN Temui Gubernur Bali Soal Pemberhentian Kampanye 2 Anak Cukup*. Diakses 14 Maret 2020, dari <https://www.liputan6.com/health/read/4042476/kepala-bkkbn-temui-gubernur-bali-soal-pemberhentian-kampanye-2-anak-cukup>
- Lövbrand, E., & Stripple, J. (2015). Foucault and critical policy studies. Dalam D. T. Frank Fischer (Ed.), *Handbook of Critical Policy Studies* (h. 92-108). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- McGuigan, J. (2003). Cultural Policy Studies. In J. Lewis, & T. Miller (Eds.), *Critical Cultural Policy Studies: A Reader* (h. 23-42). Oxford: Blackwell Publishing.
- Media Indonesia. (28 Juni 2019). *Koster Tolak Program KB di Bali*. Diakses 18 Desember 2019, dari Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/read/detail/243721-koster-tolak-program-kb-di-bali>
- Mudita, I. P. (2009). Perbedaan Fertilitas Antara Penduduk Pendetang dan Penduduk Lokal: Sebuah Studi Kasus di Daerah Perkotaan di Kota Denpasar. *Piramida*, 5 (1).

- Mulcahy, K. V. (2017). *Public Culture, Cultural Identity, Cultural Policy: Comparative Perspectives*. New York: Palgrave Macmillan.
- Nordholt, H. S. (2010). *Bali: Benteng Terbuka 1995-2005*. Denpasar: Pustaka Larasan dan KITLV.
- Palsson, G. (2014). Personal Names: Embodiment, Differentiation, Exclusion, and Belonging. *Science, Technology, & Human Values*, 39(4), 618-630. DOI: 10.1177/0162243913516808
- Picard, M. (1999). The Discourse of Kebalian: Transcultural Constructions of Balinese Identity. Dalam R. Rubinstein, & L. H. Connor (Eds.), *Staying Local in the Global Village: Bali in the Twentieth Century* (h. 15-49). Honolulu: University of Hawaii Press.
- Pringle, R. (2004). *A Short History of Bali, Indonesia's Hindu Realm*. Crows Nest: Allen & Unwin.
- Santikarma, D. (2007 [2003]). The Model Militia. Inside Indonesia. Diakses 23 Mei 2020, dari <https://www.insideindonesia.org/the-model-militia-2>
- Scarpello, F. (2017). Beyond Copenhagen: The Political Economy of Securitising "Outside Influences" in Bali. *Journal of Contemporary Asia*, 48(1), 1-22. DOI: 10.1080/00472336.2017.1362583
- Streatfield, K. (1982). *Fertility Decline in a Traditional Society: The Case of Bali (Disertasi)*. Department of Demography, Australian National University.
- (2018). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017*. Jakarta: BPS; BKKBN; Kemenkes; USAID.
- Suryawan, I. N. (27 Juli 2019). *KB Krama Bali dan Kualitas Hidup Manusia Bali*. Diakses 3 Juni 2020, dari <https://balebengong.id/kb-krama-bali-dan-kualitas-hidup-manusia-bali/>
- Tamatea, L. (2011). Ajeg Bali discourse: globalisation, fear and Othering. *Asian Ethnicity*, 12 (2), 155-177. DOI: 10.1080/14631369.2011.571835
- Tokoh. (Edisi 957, 12-18 Juni 2017). *Demi Eksistensi Hindu, Gusti Wedakarna Ingatkan Pentingnya KB Bali 4 Anak*.
Tribun Bali. (1 Oktober 2019). *KB 4 Anak Krama Bali, Begini Tanggapan Kepala BKKBN*. Diakses 8 Maret 2020, dari <https://bali.tribunnews.com/2019/10/01/kb-4-anak-krama-bali-begini-tanggapan-kepala-badan-kependudukan-dan-keluarga-berencana-nasional>
- Tribun Bali. (8 Juli 2019). *Made Adnyana Ole: Untuk Apa Banyak Anak jika Tak Berkualitas*. Diakses 17 Mei 2020, dari <https://bali.tribunnews.com/2019/07/08/kritik-soal-kebijakan-kb-krama-bali-made-adnyana-ole-untuk-apa-banyak-anak-jika-tak-berkualitas>
- Walters, W., & Haahr, J. H. (2005). *Governing Europe: Discourse, Governmentality and European Integration*. New York: Routledge.
- Wijaya, N. (2012). *Melawan Ajeg Bali: Seabad Praktek Hegemoni Intelektual Organik Bali*.